



Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Ekowisata di Ekowisata Nologaten

Collaborative Governance in the Development of Ecotourism-Based Tourism Villages in Nologaten Ecotourism

Yelky Rudolf Lasampa* & Ardiyati

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ekonomi dan Sosial,
Universitas Amikom Yogyakarta, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan collaborative governance dalam pengembangan Ekowisata Nologaten, sebuah kawasan wisata yang terletak di RW 04, Nologaten, Caturtunggal, Kabupaten Sleman. Kawasan ini sebelumnya merupakan permukiman kumuh di bantaran Sungai Gajah Wong, namun berhasil direvitalisasi melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) sejak tahun 2017. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melibatkan delapan informan dari unsur pemerintah desa, pengelola ekowisata, dan masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan Ekowisata Nologaten melibatkan kolaborasi multipihak dengan peran yang terstruktur, kepemimpinan fasilitatif, serta proses komunikasi dan trust building yang kuat. Kolaborasi ini mendorong pelestarian lingkungan, konservasi budaya, dan peningkatan ekonomi lokal, meskipun masih terdapat tantangan dalam pengelolaan sampah dan promosi wisata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa collaborative governance merupakan pendekatan efektif dalam mewujudkan tata kelola pariwisata berkelanjutan yang partisipatif dan berbasis pemberdayaan masyarakat. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan desa wisata lainnya di Indonesia.

Kata Kunci: Collaborative Governance; Pengembangan Desa Wisata; Ekowisata Nologaten.

Abstract

This study aims to analyze the application of collaborative governance in developing Nologaten's Ecotourism, a tourist area located in RW 04, Nologaten, Caturtunggal, Sleman Regency. This area was previously a slum on the banks of the Gajah Wong River, but has been successfully revitalized through the City Without Slums (Kotaku) program since 2017. The research uses a qualitative approach with a case study method, involving eight informants from elements of the village government, ecotourism managers, and the community. Data were collected through in-depth interviews, direct observations, and documentation, then analyzed using thematic analysis techniques. The study results show that the development of Nologaten Ecotourism involves multi-stakeholder collaboration with structured roles, facilitative leadership, and a strong communication and trust-building process. This collaboration promotes environmental conservation, cultural conservation, and local economic improvement, although there are still challenges in waste management and tourism promotion. This study concludes that collaborative governance is an effective approach in realizing participatory and community-based sustainable tourism governance. This finding is expected to be a reference for the development of other tourist villages in Indonesia.

Keywords: Collaborative Governance; Tourism Village Development; Nologaten Ecotourism.

How to Cite: Lasampa, Y. R., & Ardiyati. (2025). Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Ekowisata di Ekowisata Nologaten. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 7(1): 106-113.

*E-mail: yelky.rudolf.lasampa@students.amikom.ac.id

ISSN 2722-1148 (Online)



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang dianugerahi kekayaan alam melimpah, mulai dari sumber daya laut, hutan tropis, keanekaragaman hayati, hingga potensi wisata alam yang tersebar dari Sabang sampai Merauke (Permana, 2020). Namun, kekayaan ini belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan krusial yang masih membayangi sebagian besar masyarakat, yaitu kemiskinan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan Indonesia meningkat dari 6,56% pada September 2019 menjadi 7,38% pada Maret 2020. Sementara itu, di wilayah pedesaan, angka tersebut juga mengalami peningkatan dari 12,60% menjadi 12,82% pada periode yang sama (Badan Pusat Statistik, 2020). Fakta ini mengindikasikan bahwa masih terdapat tantangan besar dalam upaya pemerataan kesejahteraan. Kenaikan angka kemiskinan ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga menyentuh sektor pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan sosial secara keseluruhan (Pangestu, 2022).

Salah satu strategi yang dapat dioptimalkan untuk menjawab tantangan tersebut adalah melalui pengembangan sektor pariwisata, khususnya pariwisata berbasis lingkungan atau ekowisata. Pariwisata berkelanjutan telah menjadi paradigma baru dalam pembangunan sektor pariwisata yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal (Hutauruk, 2021; Manurung et al., 2022; Patana et al., 2020). Dalam implementasinya, pendekatan ini membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, khususnya pemerintah dan sektor swasta, untuk memastikan bahwa pengelolaan kawasan wisata tidak justru menjadi ancaman bagi kelestarian alam. Pemerintah memegang peranan penting dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang mendorong prinsip keberlanjutan, sementara sektor swasta berkontribusi melalui investasi, inovasi teknologi ramah lingkungan, serta penerapan praktik bisnis yang beretika (Febriandhika & Kurniawan, 2019).

Seiring dengan berkembangnya kesadaran global terhadap pentingnya pelestarian lingkungan, konsep ekowisata muncul sebagai pendekatan yang semakin relevan. Ekowisata bukan sekadar bentuk rekreasi yang menawarkan keindahan alam, tetapi juga sarana edukatif yang mendorong wisatawan untuk terlibat aktif dalam upaya konservasi lingkungan. Argubi (2020) menekankan bahwa ekowisata mengusung prinsip keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian alam, menjadikannya solusi alternatif dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dalam praktiknya, ekowisata mendorong wisatawan untuk tidak hanya menikmati panorama, tetapi juga memahami pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem serta menghargai budaya lokal (Dewi Siregar, 2022; Lase et al., 2018).

Lebih lanjut, Suryanti dan Indrayasa (2021) menyatakan bahwa keberhasilan pengembangan ekowisata sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam pengelolaan kawasan. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga agen pelestari dan inovator dalam kegiatan ekowisata (Amiruddin & Arifin, 2020; Suryanti & Indrayasa, 2021; Wisnumurti & Larantika, 2021). Dalam konteks ini, pelibatan aktif masyarakat di setiap tahapan pengembangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi menjadi kunci utama dalam menciptakan dampak positif yang berkelanjutan. Salah satu bentuk nyata implementasi ekowisata dengan pendekatan partisipatif dapat ditemukan di kawasan Nologaten.

Ekowisata Nologaten menjadi contoh menarik bagaimana masyarakat dari RT 1, RT 2, RT 10, hingga RW 4 turut berkontribusi dalam pembangunan kawasan wisata berbasis lingkungan tersebut. Mereka terlibat langsung dalam berbagai kegiatan, mulai dari pembangunan fasilitas, pelestarian lingkungan, hingga promosi kawasan wisata. Namun, di balik capaian tersebut, masih terdapat persoalan yang belum terselesaikan, salah satunya adalah masalah pengelolaan sampah. Sampah yang dibuang sembarangan, termasuk ke sungai, menjadi sumber kejenuhan masyarakat

yang merasa bahwa upaya mereka belum mendapatkan dukungan struktural yang memadai. Sebagian besar masyarakat menunjukkan semangat untuk berubah dan beradaptasi dengan nilai-nilai keberlanjutan, namun masih ada kelompok yang belum menyadari sepenuhnya pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari ekosistem pariwisata.

Untuk mengatasi tantangan kompleks dalam pengembangan ekowisata, diperlukan pendekatan tata kelola kolaboratif atau *collaborative governance*, yang menekankan keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, sektor swasta, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal dalam perumusan hingga evaluasi kebijakan publik (Luna et al., 2010; Wati et al., 2022; Wijayanti & Muallidin, 2021). Model ini muncul sebagai respons terhadap persoalan sosial-ekologis yang tidak dapat diselesaikan secara sektoral, dengan tujuan menciptakan keputusan yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah berperan sebagai fasilitator melalui penyediaan regulasi dan dukungan sumber daya, sementara masyarakat lokal bertindak sebagai pelaksana utama di lapangan. Keberhasilan model ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor yang dibangun atas dasar kepercayaan, transparansi, dan tujuan bersama (Manajemen et al., 2023; Mayolita Panjaitan et al., 2023; Natasia et al., 2024).

Pengalaman dari Ekowisata Nologaten membuka ruang untuk merefleksikan sejauh mana model *collaborative governance* dapat diterapkan secara efektif dalam konteks lokal Indonesia. Diperlukan pemetaan aktor yang terlibat, analisis kepentingan masing-masing pihak, serta penilaian terhadap sejauh mana partisipasi yang terjadi bersifat substantif dan berkelanjutan. Selain itu, perlu dikaji pula mekanisme komunikasi dan koordinasi yang dijalankan, termasuk hambatan-hambatan yang muncul dalam prosesnya. Kesadaran kolektif masyarakat dalam mengelola kawasan wisata ini perlu ditopang oleh struktur kelembagaan yang inklusif serta sistem monitoring dan evaluasi yang transparan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran masing-masing aktor yang terlibat dalam pengembangan Ekowisata Nologaten, mengidentifikasi bentuk kolaborasi yang terjadi antar pemangku kepentingan, dan mengevaluasi sejauh mana kolaborasi tersebut berkontribusi terhadap keberhasilan pengelolaan ekowisata yang berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan model tata kelola pariwisata berkelanjutan di tingkat lokal di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam dinamika *Collaborative Governance* dalam pengembangan Desa Wisata berbasis Ekowisata Nologaten. Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap kompleksitas interaksi antaraktor dan konteks sosial yang melatarbelakangi proses kolaboratif tersebut. Fokus utama penelitian adalah pada penerapan prinsip-prinsip *collaborative governance* dalam tata kelola pariwisata berkelanjutan, termasuk peran serta masyarakat, pemerintah, dan pengelola wisata. Objek penelitian ini adalah praktik kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan Ekowisata Nologaten, sedangkan subjek penelitian terdiri dari individu atau kelompok yang terlibat langsung dalam proses tersebut.

Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive, yaitu mereka yang dinilai memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dalam pengembangan ekowisata. Jumlah informan sebanyak delapan orang, yang terdiri dari: dua orang perwakilan Pemerintah Desa Caturtunggal, dua pengelola Ekowisata Nologaten, tiga warga aktif dari RT 1, RT 2, dan RT 10 yang berpartisipasi dalam kegiatan wisata, serta satu tokoh masyarakat yang berperan sebagai inisiator awal pengembangan ekowisata. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan panduan semi-terstruktur untuk menggali pandangan, pengalaman, dan

refleksi para informan terkait kolaborasi yang terbentuk. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi langsung ke lokasi untuk mengamati praktik kolaborasi, aktivitas pariwisata, serta kondisi sosial dan lingkungan di kawasan Nologaten. Pengumpulan data juga dilengkapi dengan studi dokumentasi, seperti dokumen kebijakan desa, laporan kegiatan wisata, notulensi rapat, dan materi promosi ekowisata.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, seperti warga, pengelola, dan pemerintah desa, guna memperoleh gambaran yang lebih utuh dan menghindari bias informasi. Sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan observasi lapangan serta dokumen tertulis. Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis tematik, yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola, tema utama, dan hubungan antar elemen dalam praktik collaborative governance. Langkah-langkah analisis meliputi transkripsi wawancara, koding data, pengelompokan tema, dan penarikan kesimpulan secara reflektif dan interpretatif sesuai konteks lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekowisata Nologaten yang terletak di RW 04, Nologaten, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan contoh nyata keberhasilan transformasi kawasan kumuh menjadi destinasi wisata berbasis ekowisata. Kawasan ini awalnya merupakan bantaran Sungai Gajah Wong yang tercemar dan dipenuhi sampah, sebagaimana tercantum dalam SK Bupati Sleman Nomor 14.31/Kep.KDH/A/2016 tentang Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan. Namun, melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang dimulai pada tahun 2017, kawasan tersebut mengalami perubahan signifikan. Dengan dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Dinas Lingkungan Hidup, serta kolaborasi multipihak, kawasan ini dikembangkan menjadi ruang terbuka hijau yang layak huni dan menarik secara estetika.

Pendekatan collaborative governance menjadi landasan utama dalam pengembangan Ekowisata Nologaten. Model ini menekankan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi pendukung dalam seluruh proses pengambilan keputusan hingga pelaksanaan. Konsep ini menjadi penting karena permasalahan publik, seperti transformasi kawasan kumuh, tidak bisa diselesaikan oleh satu aktor saja. Menurut Ansell dan Gash (2008), terdapat beberapa parameter dalam collaborative governance, seperti desain institusional, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif, yang semuanya dapat diamati dalam pengelolaan Ekowisata Nologaten.



Gambar 1. Ekowisata Nologaten
Sumber: Hasil Dokumentasi penulis

Kondisi awal yang melatarbelakangi pengembangan ekowisata ini adalah keprihatinan terhadap lingkungan yang kotor dan tidak tertata. Melalui kewenangan yang diberikan oleh

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta PP Nomor 43 Tahun 2014, Kalurahan Caturtunggal dan Kapanewon Depok memiliki dasar hukum untuk mengelola potensi wilayah, termasuk pengembangan wisata. Pembangunan dimulai tahun 2018 dengan berbagai program seperti pembuatan gazebo, taman bermain, kolam ikan, dan wahana flying fox. Visi pembangunan ini sejalan dengan program Tri Daya Pembangunan Kalurahan, yakni bidang sosial budaya, ekonomi, serta lingkungan dan kesehatan.

Dari segi desain institusional, kolaborasi dalam pengembangan Ekowisata Nologaten melibatkan banyak elemen. Pemerintah Kalurahan Caturtunggal dan Kapanewon Depok berfungsi sebagai pengawas utama. Padukuhan dan RT/RW bertindak sebagai pengelola teknis di lapangan, sementara masyarakat Nologaten terlibat langsung sesuai dengan kapasitas dan peran masing-masing. Dinas Pariwisata Sleman berperan dalam pembinaan dan pelatihan terkait pengelolaan wisata, sedangkan Dinas Lingkungan Hidup mendampingi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Bentuk konkret dari desain ini terlihat dari struktur organisasi pengelola Ekowisata Nologaten serta pengakuan formal melalui SK Kepala Dinas Pariwisata Sleman Nomor 556/040/Kep. Dinas Pariwisata/2024 yang menetapkan kawasan ini sebagai Desa Wisata Rintisan.

Kepemimpinan fasilitatif menjadi aspek penting yang turut menunjang keberhasilan kolaborasi. Pemimpin Ekowisata Nologaten tidak hanya menjadi pengatur teknis, tetapi juga berperan sebagai penggerak masyarakat dan penjaga visi kolektif. Visi pemimpin adalah memastikan ekowisata dikelola dengan baik, memberikan manfaat bagi lingkungan dan kesejahteraan warga. Ia aktif membangun kepercayaan, mendorong komunikasi yang terbuka, dan menjaga komitmen bersama. Walaupun sempat terkendala waktu dalam penyelenggaraan pertemuan rutin, pemimpin mampu menjaga keberlangsungan koordinasi serta menjaga arah pengembangan tetap pada jalur yang telah disepakati bersama.

Proses kolaboratif dimulai dari dialog tatap muka antara berbagai aktor, mulai dari Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Padukuhan Nologaten, hingga masyarakat setempat. Dialog ini menghasilkan kesepakatan bersama untuk menjadikan kawasan sebagai destinasi ekowisata yang tidak hanya bersih, tetapi juga produktif. Pembangunan fisik seperti gazebo, kolam ikan, dan taman dilakukan secara gotong royong. Tak hanya itu, pembentukan kelembagaan pengelola juga disertai pelatihan dari Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup. Proses ini memperkuat pemahaman masyarakat tentang pengelolaan wisata yang berkelanjutan serta pelestarian lingkungan.

Setelah dialog, tahap penting lainnya adalah membangun kepercayaan (*trust building*) antara para pihak. Pengelola Ekowisata Nologaten menunjukkan hubungan harmonis dengan Kalurahan sebagai penanggung jawab. Dukungan masyarakat juga tinggi, terlihat dari partisipasi mereka dalam menjaga kebersihan dan keterlibatan langsung dalam kegiatan wisata. Kepercayaan ini menjadi pondasi untuk memelihara komitmen jangka panjang terhadap program ekowisata.

Komitmen yang terbangun tampak dalam pembagian tugas yang jelas dan pelaksanaan fungsi secara konsisten oleh para aktor. Pertemuan rutin bulanan dan evaluasi enam bulanan oleh pihak Kalurahan berkontribusi pada peningkatan kualitas fasilitas dan pelayanan. Proses kolaborasi ini tidak hanya menghasilkan perbaikan fisik kawasan, tetapi juga melahirkan sistem kerja yang tertata, menjadikan Ekowisata Nologaten model pengelolaan kolaboratif berbasis komunitas.

Dari perspektif ekowisata, pengembangan Nologaten mengandung tiga elemen penting: pelestarian alam, konservasi seni budaya, dan peningkatan ekonomi lokal. Dalam hal pelestarian alam, berbagai langkah dilakukan, seperti penghijauan bantaran sungai, pemeliharaan ikan dengan sistem karamba, dan pengelolaan sampah yang sistematis. Pengelola bahkan memasang

jaring penyaring sampah untuk mencegah pencemaran saluran air. Hasil pemilahan sampah dijual, dan pendapatannya digunakan kembali untuk mendanai pengembangan ekowisata.



Gambar 2 pengolahan sampah di Ekowisata Nologaten
Sumber: Hasil dokumentasi penulis

Konservasi seni dan budaya juga menjadi aspek penting. Gazebo-gazebo di kawasan ini memiliki desain tradisional dengan ornamen khas Jawa. Terdapat pula bangunan bergaya joglo yang digunakan untuk berbagai kegiatan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa ekowisata tidak hanya menawarkan wisata alam, tetapi juga menjadi ruang pelestarian warisan budaya lokal.



Gambar 3 Bangunan dengan struktur budaya Jawa di Ekowisata Nologaten
Sumber: Hasil dokumentasi penulis

Aspek terakhir adalah peningkatan ekonomi lokal. Kehadiran ekowisata menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha bagi warga sekitar. Berbagai wahana dan kegiatan seperti flying fox, terapi ikan, kuliner, dan kopi dikelola langsung oleh masyarakat. Meskipun peningkatan ekonomi belum signifikan karena keterbatasan promosi, namun dampak positif mulai dirasakan. Banyak warga yang mulai memperoleh tambahan penghasilan dari aktivitas wisata ini.



Gambar 4 Daftar Wahana Ekowisata Nologaten
Sumber: Hasil dokumentasi penulis

Dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar pengembangan pariwisata berkelanjutan yakni keberlangsungan ekologi, kehidupan budaya, ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Ekowisata Nologaten menunjukkan bahwa kolaborasi yang kuat antar elemen dapat menjadi kunci sukses pembangunan desa wisata. Collaborative governance tidak hanya membangun sistem tata kelola yang partisipatif, tetapi juga membuka jalan bagi masyarakat untuk turut memiliki dan mengelola ruang hidupnya secara berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pengembangan Ekowisata Nologaten menunjukkan bahwa pendekatan collaborative governance mampu menjadi strategi efektif dalam membangun desa wisata berbasis lingkungan yang berkelanjutan. Melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendukung seperti Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup, kawasan yang dulunya kumuh berhasil ditransformasi menjadi ruang terbuka hijau yang bersih, tertata, dan produktif. Kolaborasi ini tidak hanya melibatkan perencanaan dan pembangunan fisik, tetapi juga pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, pelestarian lingkungan, dan pelestarian budaya lokal. Keberhasilan pengembangan ini terlihat dari meningkatnya partisipasi warga, terbentuknya struktur kelembagaan yang kuat, serta hadirnya kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga lingkungan sebagai aset wisata dan sumber kesejahteraan bersama.

Dengan mengacu pada prinsip ekowisata, yaitu pelestarian alam, konservasi budaya, dan peningkatan ekonomi lokal, Ekowisata Nologaten mampu menjadi model praktik tata kelola wisata yang kolaboratif dan adaptif. Penelitian ini memperlihatkan bahwa kunci keberhasilan bukan hanya pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada pembangunan relasi sosial, komunikasi yang efektif, dan komitmen berkelanjutan dari seluruh aktor. Oleh karena itu, collaborative governance dapat direkomendasikan sebagai pendekatan strategis dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di wilayah lain di Indonesia, terutama dalam konteks penanggulangan kemiskinan, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara terpadu.

REFERENSI

- Amiruddin, & Arifin, Z. (2020). Perencanaan Pengembangan Desa Ekowisata Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Ilmiah Administratita*, 11(01), 16–24.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Argubi, A. H., Ramadhuan, R. I., Tauhid, T., & Taufiq, M. (2020). Model pengembangan Desa Wisata Berbasis Ekowisata Di Desa Sambori Kabupaten Bima. *Sadar Wisata: Jurnal Pariwisata*, 3(1), 41–51. <https://doi.org/10.32528/sw.v3i1.3372>
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2020*.
- Dewi Siregar, F. Y. (2022). Peran Masyarakat dalam Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan pada Sektor Industri Kehutanan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1423–1431. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i3.882>
- Febriandhika, I., & Kurniawan, T. (2019). Membingkai Konsep Pariwisata Yang Berkelanjutan Melalui Community-Based Tourism : Sebuah Review Literatur. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 3(2), 50. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v3n2.p50-56>
- Hutauruk, S. P. (2021). *TA: Perancangan Destination Branding Ekowisata Tangkahan Kabupaten Langkat sebagai Upaya meningkatkan Brand Awareness*. Universitas Dinamika.
- Lase, E., Sihombing, M., Thamrin, H., Studi, P., Studi, M., Ilmu, F., Dan, S., Politik, I., & Utara, U. S. (2018). *ANTHROPOS: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya Analisis Strategi Pengembangan Kawasan Pariwisata di Kabupaten*. 4(1), 126–138.
- Luna, A., Costa, C., Moura, H., Novaes, M., & Nascimento, C. (2010). Agile Governance in Information and Communication Technologies: Shifting Paradigms. *JISTEM Journal of Information Systems and Technology Management*, 7(2), 311–334. <https://doi.org/10.4301/s1807-17752010000200004>
- Manajemen, P. S., Ekonomika, F., Kristen, U., & Wacana, S. (2023). *Pengembangan Model Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal di Desa Wisata Nonongan, Kabupaten Toraja Utara Development*

- of a Sustainable Tourism Model Based on Local Wisdom in Nonongan Tourism Village, North Toraja Regency.* 12(3), 942–951. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i3.9489>
- Manurung, W. A., Restu, I. W., & Kartika, G. R. A. (2022). Analisis kelayakan potensi ekowisata Pantai Pandan, Kecamatan Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. *Bumi Lestari*, 22(1), 1–11.
- Mayolita Panjaitan, R. Hamdani Harahap, & Hadriana Marhaeni Munthe. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata Desa Kuta Jungk Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara. *Perspektif*, 12(1), 171–184. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i1.8108>
- Natasia, D., Tarigan, B., Suharyanto, A., & Deliana, M. (2024). *Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui BUMDes Arah Ersada di Desa Raya.* 6(1), 85–93. <https://doi.org/10.31289/jipikom.v6i1.3017>
- Pangestu, T. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal di Wisata Kampoeng Purba Kelurahan Brangkal, Gemolong, Sragen. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 2(1), 87–93. <https://doi.org/10.53769/jai.v2i1.183>
- Patana, P., Nasution, A. D., Harahap, Z. A., Lumbanraja, P., Lubis, A. N., Onrizal, O., Hartono, R., & Aulia, I. (2020). Tantangan Merintis Kemitraan Ekowisata Mangrove: Lesson Learning Bersama Masyarakat Pesisir Belawan. *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)*, 3, 511–519.
- Permana, R. R. (2020). *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan dalam Pemanfaatan Energi Geothermal Untuk Kesejahteraan Masyarakat.* Penerbit Adab.
- Suryanti, P. E., & Indrayasa, K. B. (2021). Perkembangan Ekowisata Di Bali : “Upaya Pelestarian Alam Dan Budaya Serta Pemberdayaan Masyarakat Lokal.” *Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Agama Dan Budaya*, 6(1), 48. <https://doi.org/10.25078/pba.v6i1.1970>
- Wati, H., Muda, I., & Nasution, I. (2022). Implementasi Program Kartu Indonesia Sehat Di Desa Lubuk Saban Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pemerintahan (JIAPP)*, 1(2), 63–70. <https://doi.org/10.31289/jiaap.v2i1.782>
- Wijayanti, R. S., & Muallidin, I. (2021). *Poverty Alleviation Efforts by Village Governments in Traji Village , Parakan District , Temanggung.* 9(1), 54–64. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v9i1.4116>
- Wisnumurti, A. A. G. O., & Larantika, A. A. . D. (2021). Collaborative Governance: Model Pengembangan Ekowisata di Desa Siangan. In *Postgraduated Community Service Journal* (Vol. 2, Issue 1, pp. 10–15). <https://doi.org/10.22225/pcsj.2.1.2021.10-15>